

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD) PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI UTARA (TAHUN 2016-2018)**

*ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE OF THE PROVINCIAL GOVERNMENT REVENUE
AND EXPENDITURE BUDGET (APBD)
NORTH SULAWESI (2016-2018)*

Oleh:

Sanchia Darlene Rawis¹

Hendrik Manosoh²

Rudy J. Pusung³

1,2,3Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:

1sanchiarawis97@gmail.com

2hendrikmanosoh@gmail.com

3rudypusung017@gmail.com

Abstrak: Analisis terhadap kinerja keuangan daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan informasi penting yang dilakukan untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan aturan-aturan dan menilai apakah pemerintah Provinsi berhasil mengelola keuangannya secara baik dan benar. Melalui kinerja keuangan, para pengambil keputusan akan mendapatkan gambaran mengenai seluruh rangkaian kinerja dan aktifitas perusahaan serta menemukan kelemahan di dalam kinerja perusahaan yang dapat menimbulkan masalah dimasa yang akan datang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan menggunakan teknik analisis data perhitungan dari formula analisis kinerja keuangan pendapatan daerah dan analisis kinerja keuangan belanja daerah. Penilaian kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diukur berdasarkan teknik analisis data. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data dan ditarik kesimpulannya. Hasil yang didapat sebagian besar sudah memenuhi kriteria yang ditentukan berdasarkan teknik analisis kinerja keuangan pendapatan dan belanja daerah.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah, Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah

Abstract: Analysis of the regional financial performance of North Sulawesi Province is important information carried out to make regional financial policies that comply with the rules and assesses whether the provincial government manage its finances properly and correctly. Through financial performance, decision makers will get an overview of the entire set of company performance and activities and find weaknesses in company performance that can cause problems in the future. This research aims to determine the financial performance of the North Sulawesi Provincial Government by using data analysis calculation techniques from the formula of regional revenue financial performance analysis and analysis of regional expenditure financial performance. Financial performance evaluation of the regional income and expenditure budget which is measured based on data analysis techniques. The analytical method used in this research uses descriptive qualitative methods by collecting data and drawing conclusions. The results obtained mostly meet the criteria determined based on regional income and expenditure.

Keywords: Financial Performance, regional income, regional expenditure

PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Pada saat ini perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pembangunan suatu bangsa tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari pemerintah yang ada dibawahnya, hal tersebut tentunya hanyalah kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah yang kuat serta mampu berkembang atau tidak, tergantung pada cara mengelola keuangannya. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan membuat aset daerah terjaga keutuhannya.

Dalam hal ini untuk mengelola anggaran keuangan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta mengacu pada Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 ayat 3 yang sangat diharapkan oleh banyak pihak yaitu sistem pembagian keuangan yang adil, demokratis, transparan dan efisien sehingga dapat memberikan semangat bagi seluruh warga negara Indonesia dan pemerintah daerah khususnya untuk memberdayakan sumber daya ekonomi yang ada baik secara mandiri, ekonomis, efisien dan efektif.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat menjadi cerminan kinerja dan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di daerah masing-masing pada suatu anggaran. Pengukuran kinerja keuangan memiliki dua tujuan, yaitu pengukuran kinerja keuangan digunakan untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan dan untuk mengetahui kemampuan dalam mendayagunakan semua aset.

Kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Utara meningkatkan APBD tanpa harus melanggar norma-norma dengan cara mengoptimalkan potensi yang ada. Optimalisasi PAD dari sisi penerimaan hendaknya diikuti dengan pengelolaan anggaran dari sisi pengeluaran dan dikelola dengan baik dengan prinsip *value for money* serta dilakukan secara komprehensif dengan berbagai strategi sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan daerah dan keuangan negara, dengan peningkatan prosedur pengendalian intern pemerintah daerah agar terpenuhi prinsip *stewardship* dan *accountability*.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. Kinerja keuangan anggaran pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara selama tahun 2016-2018.
2. Kinerja keuangan anggaran belanja daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara selama tahun 2016-2018.

TINJAUAN PUSTAKA**Akuntansi**

Bahri (2016:2) Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisarian dan pelaporan atas suatu transaksi dengan cara sedemikian rupa, sistematis dari segi isi dan berdasarkan standar yang diakui umum. Kartikahadi (2016:3) Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

Akuntansi Pemerintahan

Suparna (2018:258) Akuntansi pemerintahan meliputi aktivitas pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisarian, pelaporan transaksi-transaksi keuangan pemerintah sebagai suatu kesatuan dari unit-unitnya, serta penafsiran atas hasil aktivitas ini. Riyanto (2015:3) Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan yang memiliki karakteristik khususnya diantaranya lebih menekankan pada pencatatan pelaksanaan anggaran negara serta pelaporan realisasinya.

Kinerja Keuangan

Menurut Hery (2015:25) Kinerja keuangan merupakan suatu usaha formal untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dan posisi kas tertentu. Fathah (2017) Kinerja keuangan adalah salah satu ukuran yang dihasilkan dari kegiatan atau program sehubungan dengan anggaran daerah dan mampu digunakan untuk melihat kemampuan daerah.

Pengukuran Kinerja Keuangan.

Purnamasari (2019) Pengukuran kinerja keuangan mampu mengetahui kekuatan dan kelemahan kinerja keuangan suatu instansi serta mengevaluasi kinerja keuangan dan menetapkan tujuan untuk kinerja masa mendatang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran bersangkutan harus dicatat dalam APBD. Penyusunan APBD dilaksanakan dengan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya mencapai hasil kerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan.

Analisis Kinerja Keuangan APBD

Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dalam dua bagian yaitu:

- 1) Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah
 - a. Analisis Varians Pendapatan Daerah
Jika selisih lebih maka dikatakan bahwa kinerja keuangan pendapatan yang baik, sedangkan jika terdapat selisih kurang maka kinerja keuangan pendapatan daerah dinilai kurang baik (Arifa, 2017).
 - b. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah
Pertumbuhan secara positif dikatakan bahwa kinerja keuangan pendapatan cenderung meningkat apabila pertumbuhan secara negatif dikatakan kinerja keuangan pendapatan mengalami penurunan (Arifa, 2017).
 - c. Derajat Desentralisasi
Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Arifa, 2017).

Tabel 1 Kriteria Rasio Derajat Desentralisasi Daerah

Kemampuan Desentralisasi	Rasio Derajat Desentralisasi (%)
Sangat baik	>50%
Baik	25-50%
Kurang baik	10-25%
Tidak baik	<10%

Sumber: Arifa (2017)

- d. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan (Arifa, 2017).

Tabel 2 Kriteria Penilaian Efektivitas PAD

Kriteria Efektivitas	Rasio Efektivitas
Sangat efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup efektif	90% -99%
Kurang efektif	75%-89%
Tidak efektif	<75%

Sumber: Arifa (2017)

2) Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah

a. Analisis Varians Belanja Daerah

Jika terdapat selisih lebih maka dapat dikatakan memiliki kinerja keuangan belanja yang tidak baik, sedangkan jika terdapat selisih kurang maka kinerja keuangan daerah dapat dinilai baik (Arifa, 2017).

b. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah

Belanja daerah sendiri biasanya memiliki kecenderungan untuk naik, kenaikan tersebut terjadi karena adanya penyesuaian dengan inflasi, perubahan nilai tukar rupiah, perubahan cakupan pelayanan dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Kenaikan wajar atau tidaknya perlu melihat beberapa hal yang disebutkan sebelumnya dan alasan kenaikan belanja terjadi, apakah karena kenaikan internal yang relatif terencana dan terkendali ataukah faktor eksternal yang diluar kendali pemerintah daerah (Arifa,2017).

c. Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga belanja operasi ini sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang (Arifa, 2017).

Tabel 3 Kriteria Penilaian Keserasian Belanja

Kriteria Keserasian Belanja	Rasio Keserasian
Tidak serasi	0%-20%
Kurang serasi	>20%-40%
Cukup serasi	>40%-60%
Serasi	>60%-80%
Sangat serasi	>80%-100%

Sumber: Arifa (2017)

d. Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja

Rasio dapat digunakan untuk mengetahui proporsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Pengeluaran belanja modal yang dilakukan saat ini akan memberikan manfaat jangka menengah dan panjang (Arifa, 2017).

e. Analisis Efisiensi Belanja Daerah

Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100% sebaliknya jika lebih dari 100% mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran (Arifa, 2017).

Tabel 4 Kriteria Efisiensi Belanja Daerah

Kriteria Efisiensi	Rasio Efisiensi
Efisiensi	<100%
Efisiensi berimbang	=100%
Tidak efisien	>100%

Sumber: Arifa (2017)

Penelitian Terdahulu.

Poyoh et al., (2017) dalam penelitiannya berjudul Analisis Kinerja Pendapatan Dan Belanja Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon meneliti bahwa tingkat kinerja pendapatan masih kurang sedangkan tingkat kinerja belanja sudah baik.

Karlina dan Handayani (2017) dalam penelitiannya berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan APBD Kota Surabaya Tahun 2012-2015 meneliti bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendapatan dikatakan kurang.

Pandjaitan et al., (2018) dalam penelitiannya berjudul Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Manado Tahun 2011-2016 meneliti bahwa tingkat rata-rata desentralisasi rendah, rasio kemandirian daerah rendah, rasio ketergantungan masih tinggi.

Saputra et al., (2018) dalam penelitiannya berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Jembrana meneliti bahwa varian pendapatan baik, rasio pertumbuhan positif, rasio derajat desentralisasi kurang, efisiensi belanja termasuk efisien.

METODE PENELITIAN

Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data kuantitatif berupa laporan anggaran dan realisasi APBD tahun 2016-2018 Provinsi Sulawesi Utara dan data kualitatif berupa gambaran umum Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara serta data-data pendukung lainnya.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada dan data sekunder pada penelitian ini berupa laporan anggaran dan realisasi APBD tahun 2016-2018 Provinsi Sulawesi Utara.

Metode dan Proses Analisis

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: (1) mengumpulkan data berdasarkan penelitian kepustakaan dan dokumentasi mengenai informasi yang didapatkan yaitu laporan anggaran dan realisasi APBD tahun 2016-2018; (2) menggunakan teknik analisis data perhitungan dari formula analisis kinerja keuangan pendapatan dan belanja daerah; (3) melakukan perhitungan terhadap analisis kinerja keuangan pendapatan dan belanja daerah dicocokkan dengan kriteria yang ditetapkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Varians Pendapatan Daerah

Tabel 5 Perhitungan Varians Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2016-2018

Tahun	Anggaran Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Selisih (Rp)	Rasio (%)	Kinerja
2016	2.907.882.541.000	3.001.754.654.465	94.526.113.465	103,22%	Selisih Lebih
2017	3.723.698.617.672	2.760.358.125.690	(963.340.491.982)	74,12%	Selisih Kurang
2018	3.823.179.307.474	3.779.781.721.312	(43.397.586.162)	98,86%	Selisih Kurang
	Rata-rata		(912.211.964.679)	23,25%	Selisih Kurang

Sumber: Data olah, 2020

Berdasarkan pada perhitungan diatas pada tahun 2016 hasilnya selisih lebih sebesar 103,22%, pada tahun 2017 hasilnya selisih kurang sebesar 74,12%, dan pada tahun 2018 hasilnya selisih kurang sebesar 98,86% dan rata-ratanya hasilnya selisih kurang sebesar 23,25%.

Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Tabel 6 Perhitungan Pertumbuhan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2016-2018

Tahun	Pendapatan Tahun (t) (Rp)	Pendapatan Tahun (t-1) (Rp)	Rasio (%)	Kinerja
2016	3.001.754.654.465	2.527.705.785.301	15,79%	Positif
2017	2.760.358.125.690	3.001.754.654.465	(8,74%)	Negatif
2018	3.779.781.721.312	2.760.358.125.690	26,97%	Positif
	Rata-rata		11,34%	Positif

Sumber: Data olah, 2020

Berdasarkan pada perhitungan diatas pada tahun 2016 hasilnya positif sebesar 15,79%, pada tahun 2017 hasilnya negatif sebesar 8,74%, dan pada tahun 2018 hasilnya positif sebesar 26,97% dan rata-ratanya hasilnya positif sebesar 11,34%.

Derajat Desentralisasi

Tabel 7 Perhitungan Derajat Desentralisasi Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2016-2018

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio (%)	Kinerja
2016	1.141.321.190.650	10.855.697.431.253	10,51%	Kurang Baik
2017	829.550.137.277	10.142.401.242.436	8,17%	Tidak Baik
2018	1.253.804.977.826	13.844.571.937.422	9,05%	Tidak Baik
	Rata-rata		9,24%	Tidak Baik

Sumber: Data olah, 2020

Berdasarkan pada perhitungan diatas pada tahun 2016 hasilnya kurang baik sebesar 10,51%, pada tahun 2017 hasilnya tidak baik sebesar 8,17%, dan pada tahun 2018 hasilnya tidak baik sebesar 9,05% dan rata-ratanya hasilnya tidak baik sebesar 9,24%.

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Tabel 8 Perhitungan Tingkat Efektivitas PAD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2016-2018

Tahun	Anggaran Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Rasio (%)	Kinerja
2016	979.354.945.000	1.141.321.190.650	116,53%	Sangat Efektif
2017	1.094.319.346.536	829.550.137.277	75,80%	Kurang Efektif
2018	1.213.016.074.474	1.253.804.977.826	103,36%	Sangat Efektif
	Rata-rata		98,56%	Cukup Efektif

Sumber: Data olah, 2020

Berdasarkan pada perhitungan diatas pada tahun 2016 hasilnya sangat efektif sebesar 116,53%, pada tahun 2017 hasilnya kurang efektif sebesar 75,80%, dan pada tahun 2018 hasilnya sangat efektif sebesar 103,36% dan rata-ratanya hasilnya cukup efektif sebesar 98,56%.

Analisis Varians Belanja Daerah

Tabel 9 Perhitungan Varians Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2016-2018

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Selisih (Rp)	Rasio (%)	Kinerja
2016	3.060.766.551.150	2.465.306.975.250	(595.459.575.900)	80,54%	Selisih Kurang
2017	3.852.822.284.520	2.066.349.440.675	(1.786.472.843.845)	53,63%	Selisih Kurang
2018	4.129.013.863.900	3.656.101.961.037	(472.911.902.863)	88,54%	Selisih Kurang
	Rata-rata		(1.909.020.516.882)	74,23%	Selisih Kurang

Sumber: Data olah, 2020

Berdasarkan pada perhitungan diatas pada tahun 2016 hasilnya selisih kurang sebesar 80,54%, pada tahun 2017 hasilnya selisih kurang sebesar 53,63%, dan pada tahun 2018 hasilnya selisih kurang sebesar 88,54% dan rata-ratanya hasilnya selisih kurang sebesar 74,23%.

Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah**Tabel 10 Perhitungan Pertumbuhan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2016-2018**

Tahun	Realisasi Belanja Tahun (t) (Rp)	Realisasi Belanja Tahun (t-1) (Rp)	Rasio (%)	Kinerja
2016	2.465.306.975.250	2.693.083.788.018	(9,23%)	Negatif
2017	2.066.349.440.675	2.465.306.975.250	(19,30%)	Negatif
2018	3.656.101.961.037	2.066.349.440.675	43,48%	Positif
	Rata-rata		4,98%	Positif

Sumber: Data olah, 2020

Berdasarkan pada perhitungan diatas pada tahun 2016 hasilnya negatif sebesar 9,23%, pada tahun 2017 hasilnya negatif sebesar 19,30%, dan pada tahun 2018 hasilnya positif sebesar 43,48% dan rata-ratanya hasilnya positif sebesar 4,98%.

Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja**Tabel 11 Perhitungan Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2016-2018**

Tahun	Total Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Belanja Operasi (Rp)	Rasio (%)	Rasio Keserasian
2016	7.624.610.588.614	1.595.459.576.678	20,92%	Kurang Serasi
2017	10.063.292.789.274	1.513.033.717.341	15,03%	Tidak Serasi
2018	11.374.387.508.436	2.447.419.275.425	21,51%	Kurang Serasi
	Rata-rata		19,15%	Tidak Serasi

Sumber: Data olah, 2020

Berdasarkan pada perhitungan diatas pada tahun 2016 hasilnya kurang serasi sebesar 20,92%, pada tahun 2017 hasilnya tidak serasi sebesar 15,03%, dan pada tahun 2018 hasilnya kurang serasi sebesar 21,51% dan rata-ratanya hasilnya tidak serasi sebesar 19,15%.

Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja**Tabel 12 Perhitungan Belanja Modal Terhadap Total Belanja Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2016-2018**

Tahun	Total Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Belanja Modal (Rp)	Rasio (%)	Rasio Keserasian
2016	7.624.610.588.614	1.465.396.795.000	19,21%	Tidak Serasi
2017	10.063.292.789.274	292.675.426.898	2,90%	Tidak Serasi
2018	11.374.387.508.436	721.402.643.237	6,34%	Tidak Serasi
	Rata-rata		9,48%	Tidak Serasi

Sumber: Data olah, 2020

Berdasarkan pada perhitungan diatas pada tahun 2016 hasilnya tidak serasi sebesar 19,21%, pada tahun 2017 hasilnya tidak serasi sebesar 2,90%, dan pada tahun 2018 hasilnya tidak serasi sebesar 6,34% dan rata-ratanya hasilnya tidak serasi sebesar 9,48%.

Analisis Efisiensi Belanja Daerah**Tabel 13 Perhitungan Tingkat Efisiensi Belanja Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2016-2018**

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Rasio Keserasian
2016	3.060.766.551.150	2.465.306.975.250	80,54%	Efisiensi
2017	3.852.822.284.520	2.066.349.440.675	53,63%	Efisiensi
2018	4.129.013.863.900	3.656.101.961.037	88,54%	Efisiensi
	Rata-rata		74,23%	Efisiensi

Sumber: Data olah 2020

Berdasarkan pada perhitungan diatas pada tahun 2016 hasilnya efisiensi sebesar 80,54%, pada tahun 2017 hasilnya efisiensi sebesar 53,63%, dan pada tahun 2018 hasilnya efisiensi sebesar 88,54% dan rata-ratanya hasilnya efisiensi sebesar 74,23%.

Pembahasan

Analisis Varians Pendapatan Daerah.

Hasil perhitungan varians pendapatan daerah pada tahun 2016 sebesar 103,22%, tahun 2017 turun dari sebesar 74,12% dan tahun 2018 sebesar 98,86%. Dapat dilihat tahun 2016-2018 secara keseluruhan memiliki rata-rata -23,25% dimana hasilnya selisih kurang dari jumlah yang dianggarkan dan menunjukkan kinerja keuangan pendapatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dikategorikan kurang baik.

Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah.

Hasil perhitungan pertumbuhan pendapatan pada tahun 2016 sebesar 15,79%, tahun 2017 sebesar -8,74% dan tahun 2018 sebesar 26,97%. Pada tahun 2016 ke tahun 2017 terjadi penurunan atau tingkat pertumbuhannya negatif sedangkan tahun 2017 ke tahun 2018 terjadi kenaikan atau tingkat pertumbuhannya positif. Dapat dilihat tahun 2016-2018 secara keseluruhan memiliki rata-rata 11,34% yang menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengalami pertumbuhan secara positif.

Derajat Desentralisasi.

Hasil perhitungan derajat desentralisasi pada tahun 2016 sebesar 10,51%, tahun 2017 sebesar 8,17% dan tahun 2018 sebesar 9,05%. Dapat dilihat tahun 2016-2018 secara keseluruhan memiliki rata-rata 9,24% yang berarti dinilai kurang baik karena jika kemampuan daerah <10% maka kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara belum mampu dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah.

Hasil perhitungan rasio efektivitas pada tahun 2016 sebesar 116,53%, tahun 2017 sebesar 75,80% dan tahun 2018 sebesar 103,36%. Dapat dilihat tahun 2016 ke tahun 2017 terjadi penurunan yang selisihnya banyak dan kemudian terjadi peningkatan dari tahun 2017 ke tahun 2018. Rasio efektivitas pendapatan asli daerah tahun 2016-2018 secara keseluruhan memiliki rata-rata 98,56% yang hasil kerjanya dikategorikan cukup efektif dan menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mampu memobilisasi penerimaan pendapatan asli daerah sesuai yang ditargetkan.

Analisis Varians Belanja Daerah.

Hasil perhitungan varians belanja daerah pada tahun 2016 sebesar 80,54%, tahun 2017 sebesar 53,63% dan tahun 2018 sebesar 88,54%. Dapat dilihat tahun 2016-2018 secara keseluruhan memiliki rata-rata -74,23% yang menunjukkan kinerja keuangan belanja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dinilai baik karena hasilnya selisih kurang dari jumlah yang dianggarkan.

Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah.

Hasil perhitungan pertumbuhan belanja pada tahun 2016 sebesar 9,23%, tahun 2017 sebesar 19,30% dan pada tahun 2018 sebesar 43,48% dimana pertumbuhannya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dapat dilihat tahun 2016-2018 secara keseluruhan memiliki rata-rata 4,98% yang jumlah kenaikannya masih terbilang wajar dan alasannya mungkin karena faktor eksternal di luar kendali pemerintah dan dapat dikatakan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengalami pertumbuhan secara positif.

Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Hasil perhitungan rasio belanja operasi terhadap total belanja pada tahun 2016 sebesar 20,92%, tahun 2017 sebesar 15,03% dan tahun 2018 sebesar 21,51%. Dapat dilihat tahun 2016-2018 secara keseluruhan memiliki rata-rata 19,15% yang artinya kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dikategori tidak serasi.

Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja

Hasil perhitungan rasio belanja modal terhadap total belanja pada tahun 2016 sebesar 19,21%, tahun 2017 sebesar 2,90% dan tahun 2018 sebesar 6,34%. Rasio belanja modal terhadap total belanja dari tahun 2016-2018

memiliki rata-rata 9,48% yang artinya kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dikategorikan tidak serasi.

Analisis Efisiensi Belanja Daerah

Hasil perhitungan efisiensi belanja daerah pada tahun 2016 sebesar 80,54%, tahun 2017 sebesar 53,63% dan tahun 2018 sebesar 88,54%. Dapat dilihat tahun 2016-2018 secara keseluruhan memiliki rata-rata 74,23% yang artinya kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dikategorikan efisien.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Tahun 2016-2018), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2016-2018, pendapatan daerah menunjukkan kurang baik, pertumbuhan pendapatan daerah mengalami pertumbuhan yang positif, derajat desentralisasi menunjukkan rata-ratanya <10% dimana pemerintah daerah belum mampu dalam penyelenggaraan desentralisasi, efektivitas pendapatan asli daerah menunjukkan cukup efektif dan mampu dalam memobilisasikan penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan yang ditargetkan.
2. Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2016-2018, belanja daerah menunjukkan terdapat selisih kurang dari jumlah anggaran secara umum dinilai baik, pertumbuhan belanja daerah mengalami pertumbuhan secara positif dan jumlah kenaikan yang didapat masih terbilang wajar, belanja operasi terhadap total belanja masuk dalam kategori kurang serasi, belanja modal terhadap total belanja masuk dalam kategori tidak serasi dan efisiensi belanja daerah menunjukkan rasio efisiensi kurang dari 100% yang artinya pemerintah sudah melakukan penghematan anggaran belanjanya maka dikategorikan efisien.
3. Secara keseluruhan realisasi belanja tahun 2016-2018 mengindikasikan arah kebijakan pemerintah Sulawesi Utara terhadap pengembangan infrastruktur dalam rangka membangun ekonomi daerah dan memiliki dampak langsung terhadap pembangunan daerah.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang ada, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat. Saran tersebut sebagai berikut:

1. Jumlah realisasi pendapatan kurang dari jumlah yang dianggarkan sehingga terjadi selisih kurang dimana menyebabkan kinerja keuangannya kurang baik dan untuk mengatasi masalah ini yaitu harus mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada supaya terjadi peningkatan dari tahun ke tahun.
2. Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tetap mengserasikan belanja operasi dan belanja modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifa, K., N. (2017). *Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Laporan Realisasi Anggaran dan Kesesuaian Penyajian Laporan Terhadap PSAP 02 pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2015*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri, Surakarta. <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/1686/1/full%20text.pdf> Diakses pada tanggal 29 April 2019.
- Bahri, S. (2016). *Pengantar akuntansi: Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS*. Yogyakarta: Andi.
- Fathah, R., N., (2017). *Analisis rasio keuangan untuk penilaian kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul*. Jurnal EBBANK. Vol 8 No 1. <http://ebbank.stiebbank.ac.id/index.php/EBBANK/article/view/109/97> Diakses pada tanggal 18 Agustus 2019.
- Hery. (2015). *Analisis kinerja manajemen*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

- Karlina, A., & Handayani, N. (2017). *Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD Kota Surabaya tahun 2012-2015*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol 6 No 3. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/988> Diakses pada tanggal 24 April 2019.
- Kartikahadi. (2016). *Akuntansi keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pandjaitan, F., M., Tommy., P., & Victoria., N., U. (2018). *Analisis kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Manado tahun 2011-2016*. Jurnal EMBA. Vol 6 No 3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/20224> Diakses pada tanggal 9 September 2019.
- Poyoh, M., C., Murni, S., & Tulung, E., J. (2017). *Analisis kinerja pendapatan dan belanja Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon*. Jurnal EMBA. Vol 5 No 2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/15958> Diakses pada tanggal 5 September 2019.
- Purnamasari, L. (2019). *Analisis pengeluaran anggaran terhadap capaian kinerja keuangan*. Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan. Vol 7 No 1. <https://doi.org/10.17509/jpak.v7i1.15802> Diakses pada tanggal 24 April 2019.
- Riyanto. (2015). *Akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saputra, C., S., Suwendra, W., & Fridayana, Y. (2016). *Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Jembrana*. Jurnal Manajemen. Vol 4 Nomor 1. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JMI/article/view/6720> Diakses pada tanggal 25 April 2019.
- Suparna. (2018). *Esai keuangan negara multi perspektif pemikiran*. Yogyakarta: Diandra Kreatif.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.